

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sedang berkembang, untuk itu negara ini tentunya membutuhkan pengeluaran yang besar untuk membiayai pembangunan dengan tujuan mensejahterakan rakyat Indonesia. Pembangunan tersebut bisa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Besarnya pengeluaran yang dibutuhkan tersebut kemudian membuat pemerintah Indonesia untuk berupaya lebih keras mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara diperoleh dari beberapa sektor, yaitu pajak dan non pajak (kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari BUMN dan sebagainya). Dari berbagai sumber penerimaan tersebut yang paling besar adalah diperoleh dari sektor pajak.

Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai digolongkan dalam pajak tidak langsung, yakni pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabea, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan ekspor Barang Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan atau ekspor Jasa Kena Pajak terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak. Dengan pemberitahuan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. Pemusatan tempat pajak terutang PPN ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha untuk melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang adalah tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Pemusatan Tempat Pajak Terutang PPN lebih dikenal dengan Sentralisasi PPN.

Sedangkan Desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pusat kepada kantor cabang. Kelebihan sistem desentralisasi ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan hal-hal yang terjadi di cabang tanpa ada campur tangan dari pusat, sedangkan kelemahan dari desentralisasi adalah kantor pusat sulit untuk mengontrol kegiatan di kantor cabang.

Bagi perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usaha memiliki lebih dari satu cabang maka dalam melaksanakan administrasi PPN sering terjadi masalah yang disebabkan oleh tempat pelaporan PPN yang lebih dari satu tempat. Untuk mengatasi masalah tersebut maka tersedia solusi yaitu melakukan pemusatan terutang PPN sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PT. Multi Colour Indonesia merupakan kantor pusat perusahaan yang bergerak dibidang industri kimia. Perkembangan PT. Multi Colour Indonesia cukup pesat sehingga memiliki lebih dari satu cabang perusahaan. Untuk memudahkan pengadministrasian perpajakan maka manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan pemusatan PPN terutang. Sentralisasi ini bertujuan agar dapat meningkatkan efektivitas serta produktifitas perusahaan. Atas dasat itulah, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang sentralisasi sesuai dengan aturan terbaru beserta pengaruhnya dan menjadikannya sebagai bahan untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dengan Menggunakan Sistem Sentralisasi Pada PT. Multi Colur Indonesia”**.

1.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2010 tentang Penyampaian Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

1.1.2 Faktur Pajak

Dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan faktur adalah Peraturan DJP No.13/PJ/2010. Definisi baku faktur pajak menurut pasal 1 adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
2. Penerimaan pembayaran dalam hal pendapatan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

1.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf f dijelaskan yang termasuk pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Namun, pada ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa penyerahan dalam ayat (1) huruf f tersebut tidak

termasuk pengertian penyerahan barang kena pajak dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1), Pasal 16C, Pasal 16D bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
6. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

1.2 Tujuan Studi Lapang

- 1.2.1 Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma D3 Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- 1.2.2 Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh selama kuliah.
- 1.2.3 Untuk mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan sentralisasi PPN.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1.3.1 Manfaat bagi Penulis

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara langsung di lapangan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sebagai bekal dalam persaingan di dunia kerja. Serta dapat mengembangkan wawasan dan disiplin baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan.

1.3.2 Manfaat bagi Instansi

Bagi instansi dapat meningkatkan kualitas dan pemahaman mahasiswanya sehingga dapat menjadi parameter dalam menentukan alat kebijakan pendidikan ke depan. Selain itu dapat menjalin kerjasama antara Instansi terkait dengan perusahaan tempat praktik.

1.3.3 Manfaat bagi Subjek

Diharapkan dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan STIESIA, serta dapat melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa sehingga dapat dijadikan standartisasi untuk perekrutan kerja.

1.3.4 Manfaat bagi Pembaca

Bagi pembaca laporan ini, diharapkan dapat memberi wawasan baru terhadap pelaksanaan praktik kerja lapangan. Sehingga dapat membantu dan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan tugas akhir nantinya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis dalam menilai kondisi perusahaan saat ini, akan melakukan penelitian terhadap metode administrasi perusahaan, sebelum sentralisasi dan sesudah di sentralisasi. Data yang akan menjadi dasar penulis sebagai analisis penulis adalah faktur sebelum dan sesudah sentralisasi oleh PT. Multi Colour Indonesia yang bergerak di bidang industri kimia.

Ruang lingkup yang digunakan sebagai pembahasan dalam proposal ini yaitu lebih menitikberatkan pada perhitungan, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai serta tata cara dalam menerbitkan faktur pajak apabila terjadi transaksi di cabang perusahaan. Disamping itu juga pembahasan dalam tugas akhir ini dibatasi pada :

1. Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Multi Colour Indonesia telah sesuai dengan Undang-undang No.18 tahun 2000 dan Undang-undang no 42 tahun 2009.
3. Tata cara pelaporan dan pencatatan pajak terutang oleh cabang PT. Multi Colour Indonesia.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu ada beberapa yang penulis gunakan sebagai media untuk memperoleh sebuah informasi. Berikut teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ialah :

1.5.1 Penelitian Perpustakaan

Penulis mencari bahan-bahan yang dapat dijadikan referensi dan dapat membantu dalam menyusun tugas akhir ini. Bahan-bahan tersebut berupa buku-buku perpajakan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik pembahasan ini.

1.5.2 Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data tentang faktur pajak, bukti transaksi, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Data yang diperoleh penulis merupakan data primer, karena data yang didapat langsung dari sumbernya.

1.5.3 Observasi

Dimana penulis terjun langsung di lapangan guna memperoleh data yang lebih aktual dan mengetahui secara langsung mengenai sistem dari penerapan perpajakan pada perusahaan.

1.5.4 Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan pimpinan PT. Multi Colour Indonesia maupun pada karyawannya dengan tujuan memperoleh keterangan lebih terperinci mengenai perusahaan dan sistem perpajakannya.

1.5.3 Dokumentasi

Melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data, berupa bukti dan dokumen yang diperlukan.